

Analysis of the Implementation of Integration Knowledge in Basic Education, Secondary Education, and Higher Education Islam of Based Character Education

Suyahman

*Student Doctoral Program Education
University Sebelas March Surakarta
Email : sym_62@yahoo.com*

Abstract

This study aims to describe the implementation of the integration of science in elementary, secondary and college education based Islamic current character. Another aim is to describe the problems of implementation of the integration of the scientific role in elementary, secondary and college-based Islamic character education and to describe the implementation of the integration of science in elementary, secondary and college-based Islamic character education in the future.

This research is qualitative research in the form of library research data collection method used is the study of documents in the form of books, the results of research and articles related to the topic under study. Data analysis technique is done by matching the data studied in scientific books, research results and the articles relating to the variables studied.

The results showed that the implementation of scientific integrity in primary, secondary, and college Islam-based character education to date within the limits of formality, the problems faced in the implementation of the integrity of all scientists in the elementary, secondary, and college Islam-based character education is very complex ,

The study concluded that the implementation of scientific integrity in primary, secondary, and college education-based Islamic character assessment needs to be done again to the front to better implementation. The problems faced in the implementation of the integrity of all scientists in the elementary, secondary, and college education-based Islamic character needs to find a solution.

Keywords: Implementation Integration of science and all levels of education Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis pendidikan karakter saat ini. Tujuan lainnya adalah untuk mendeskripsikan problematika implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis pendidikan karakter serta mendeskripsikan implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis pendidikan karakter pada masa datang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode telaah dokumen yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang dikaji dalam buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi integritas keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi islam berbasis pendidikan karakter sampai saat ini dalam batas formalitas , problematika yang dihadapi dalam implementasi integritas ke ilmuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi islam berbasis pendidikan karakter sangat kompleks.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi integritas keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi islam berbasis pendidikan karakter perlu dilakukan pengkajian kembali agar dalam pelaksanaannya ke depan lebih baik. Problematika yang dihadapi dalam implementasi integritas ke ilmuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi islam berbasis pendidikan karakter perlu dicarikan solusinya.

Kata Kunci: Implementasi Integrasi keilmuan dan Semua Jenjang Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Integrasi adalah konsep yang menegaskan bahwa integrasi keilmuan yang disasar bukanlah model *melting-pot integration*, di mana integrasi hanya difahami dari perspektif ruang tanpa substansi. Integrasi yang dimaksud adalah model penyatuan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat sehingga

tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini perlu karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori Barat sejak lima ratus tahun terakhir, dengan semangat modernisme dan sekulerisme telah menimbulkan pengkotak-kotakan (*compartmentalization*) ilmu dan mereduksi ilmu pada bagian tertentu saja. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya proses dehumanisasi dan pendangkalan iman manusia.

Integrasi keilmuan merupakan salah satu tipologi hubungan ilmu dan agama sebagaimana tiga tipologi yang lain, yaitu tipologi konflik, independensi dan dialog.

Integrasi memiliki dua makna: Pertama, bahwa integrasi mengandung makna implisit reintegrasi, yaitu menyatukan kembali ilmu dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua, integrasi mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu dan agama merupakan kesatuan primordial. Makna yang pertama populer di Barat karena kenyataan sejarah menunjukkan keterpisahan itu. Berawal dari temuan Copernicus (1473-1543) yang kemudian diperkuat oleh Galileo Galilei (1564-1642) tentang struktur alam semesta yang heliosentris (matahari sebagai pusat tata surya) berhadapan dengan gereja yang geosentris (bumi sebagai pusat tata surya), telah melahirkan ketegangan antara ilmu dan agama. Penerimaan atas kebenaran ilmu dan agama (gereja) menjadi satu pilihan yang dilematis. Makna kedua lebih banyak berkembang di dunia Islam karena secara ontologis di yakini bahwa kebenaran ilmu dan agama adalah satu, perbedaannya pada ruang lingkup pembahasan, yang satu pengkajian dimulai dari pembacaan Al-Qur'an, yang satu dimulai dari pembacaan alam. Kebenaran keduanya saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Integrasi ilmu dengan agama dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Secara ontologis: Hubungan ilmu dan agama bersifat integratif-interdependentif, artinya eksistensi (keberadaan) ilmu dan agama saling bergantung satu sama lain. Tidak ada ilmu tanpa agama dan tidak ada agama tanpa ilmu. Ilmu dan agama secara primordial berasal dari dan merupakan bagian dari Tuhan, oleh karena Al-'Ilm adalah salah satu dari nama Tuhan, sehingga wujud (eksistensi) ilmu dan agama adalah identik dan menyatu dalam wujud Tuhan. Secara epistemologis: Hubungan ilmu dan agama bersifat integratif-komplementer, artinya seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama saling melengkapi satu sama lain. Dalam pencarian kebenaran ilmu tidak hanya menerima sumber dari kebenaran dari empiris dan rasio saja, namun juga menerima sumber kebenaran dari intuisi dan wahyu. Dan Secara aksiologi: Hubungan ilmu dan agama bersifat integratif-kualitatif, artinya seluruh nilai (kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keilahian) saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Nilai kebenaran, yang sering kali menjadi tolak ukur utama ilmu, merupakan kebenaran yang baik, yang indah dan yang ilahiah sekaligus. Justifikasi ilmu tidak hanya benar-salah (nilai kebenaran) saja, namun juga termasuk didalamnya baik-buruk (nilai kebaikan), indah-jelek (nilai keindahan) dan sacral-profane, halal-haram (nilai keilahian). Ilmu tidak bebas nilai, ilmu tidak hanya untuk ilmu tetapi ilmu harus disinari oleh-terutama-nilai tertinggi, yaitu nilai keilahian (ketuhanan). Implikasi atas saling mengkualifikasinya keseluruhan nilai dalam ilmu akan mengarahkan perkembangan ilmu menjadi ilmu yang bermoral.

Tulisan ini hanya memfokuskan pada implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis karakter dalam dimensi epistemologis. Permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: pertama bagaimanakah implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis karakter dalam dimensi epistemologis saat ini? kedua: bagaimanakah implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis karakter dalam dimensi epistemologis ke depan?

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mendeskripsikan implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis karakter dalam dimensi epistemologis saat ini dan kedua implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi Islam berbasis karakter dalam dimensi epistemologis ke depan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

Penelitian kualitatif (Qualitative research) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial (a shared social experience) yang diinterpretasikan oleh individu-individu. (Nana Syaodih, 2001 : 94).

Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic (naturalistic research), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga penelitian etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (humane instrument). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi sedangkan untuk mengetahui kevalidan data digunakan triangulasi prediktif. Validitas prediktif dimaksudkan adanya kesesuaian antara ramalan (prediksi) tentang kelakuan seseorang dengan kelakuannya yang nyata.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interaktif. Menurut Miles dan Huberman, dalam Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, (2010) tehnik interaktif terdapat tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menyatukan ilmu pengetahuan, harus berangkat dari pemahaman yang benar tentang sebab terjadinya dikotomi ilmu di Barat dan bagaimana paradigma yang diberikan Islam tentang ilmu pengetahuan. Pendidikan yang berlangsung di zaman modern ini lebih menekankan pada pengembangan disiplin ilmu dengan spesialisasi secara ketat, sehingga integrasi dan interkoneksi antar disiplin keilmuan menjadi hilang dan melahirkan dikotomi ilmu-ilmu agama di satu pihak dan kelompok ilmu-ilmu umum di pihak lain.

Dikotomi ini menyebabkan terbentuknya perbedaan sikap di kalangan masyarakat. Ilmu agama disikapi dan diperlakukan sebagai ilmu Allah yang bersifat sakral dan wajib untuk dipelajari namun kurang integratif dengan ilmu kealaman atau bisa dibilang adanya jarak pemisah antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat hauniyah. Padahal keduanya saling berhubungan erat. Hal ini berakibat pada pendangkalan ilmu-ilmu umum, karena ilmu umum dipelajari secara terpisah dengan ilmu agama. Ilmu agama menjadi tidak menarik karena terlepas dari kehidupan nyata, sementara ilmu umum berkembang tanpa sentuhan etika dan spiritualitas agama, sehingga disamping kehilangan makna juga bersifat destruktif.

Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai hamba, disamping itu, manusia memiliki tugas pokok yaitu menyembah kepada-Nya. Selain itu manusia juga sebagai khalifah, oleh karena itu, manusia diberi kemampuan jasmani (fisiologis) dan ruhani (psikologis) yang dapat ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya untuk melaksanakan tugas pokok dalam kehidupannya di dunia.

Untuk mengembangkan kemampuan dasar jasmaniyah dan ruhaniyah tersebut, maka pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menentukan sampai dimana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai. Akan tetapi proses pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan tidaklah menjamin akan terbentuknya watak dan bakat. Hidup tidak bisa lepas dari pendidikan, karena manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup. Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti diwujudkan, dan itu memerlukan pendidikan untuk memperolehnya. Inilah salah satu perbedaan antara manusia dengan

mahluk lain, yang membuat lebih unggul dan mulia. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam membentuk generasi mendatang adalah aspek pendidikan. Dengan demikian melalui pendidikan nilai-nilai ketauhidan diharapkan menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab

Dalam tataran realitas operasionalnya, mewujudkan pendidikan yang dicita-citakan di atas bukanlah persoalan yang mudah. Beragam persoalan menghadang bersamaan dengan persoalan riil warganya. Imam Bawani menyatakan bahwa ada tiga problem yang sangat mendesak untuk dilakukan kedepan, yaitu bagaimana menyeimbangkan pengokohan imtaq dengan penguasaan iptek di lembaga-lembaga pendidikan, serta memperkuat atmosfir keislaman di institusi pendidikan, dan bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam berbasis karakter pada umumnya.

Dalam dunia pendidikan, iman, ilmu dan amal menjadi sasaran utama untuk dikembangkan secara seimbang, jika tidak ia akan menghasilkan kehidupan yang timpang. Iman berkait dengan keyakinan, ilmu berkait dengan kognisi dan pengetahuan, dan amal berkait dengan praksis dan realitas keseharian. Pengembangan yang fragmentalis dan parsial serta eksklusif terhadap tiga ranah tersebut secara psikologis bisa membahayakan. Apa yang diyakini seharusnya tidak bertentangan dengan apa yang dianggap benar secara kognitif, dan apa yang dianggap secara kognitif tidak seharusnya bertentangan dengan realitas nyata yang dialami sehari-hari. Jika ditelaah secara historis, ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal perkembangannya adalah merupakan sarana untuk mengabdikan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa sarat dengan nilai-nilai spiritual. Ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa penciptaan manusia dan penciptaan makhluk hidup berbeda dengan teori evolusi. teori Darwin yang dikritik oleh ilmuwan evolusionis sendiri yaitu Pierre Paul Grasse, mengakui teori evolusi yang tidak masuk akal. Teori evolusi seolah telah menjadi sumber keyakinan di bawah kedok atheisme⁶. Konsep ini secara diam-diam tanpa disadari telah membentuk pola pikir, paradigma bahkan keyakinan peserta didik yang menafikan adanya penciptaan. Dengan menerapkan sistem pendidikan yang terpadu antara ilmu umum dan ilmu agama baik dalam konsep maupun penerapannya, diharapkan terbentuk pola fikir yang sesuai dengan ajaran Islam pada diri peserta didik. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum karena sumber dari segala ilmu itu adalah satu yaitu Allah SWT.

Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Pada era kolonial Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di Indonesia; pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, para reformis (khususnya dari kalangan Muhammadiyah) kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.

Pada masa itu, banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah. Karena pemerintah takut dari lembaga pendidikan tersebut akan muncul gerakan atau ideologi perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di bumi Indonesia ini.

Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka tahun 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Tentunya tidak lepas dari perhatian para pejabat pada saat itu. Terbukti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) sebagai badan legislatif pada waktu itu, dalam maklumatnya pada tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan dan pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah harus berjalan terus dan ditingkatkan. Dan pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dalam mencerdaskan rakyat Indonesia pada umumnya.

Pemerintah RI tidak kalah perhatiannya terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya, terbukti juga dengan dibentuknya Departemen Agama (Depag) pada 3 Januari 1946. Dalam bagian struktur organisasinya terdapat bagian pendidikan dengan tugas pokoknya mengurus masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren), di samping itu ditambah lagi dengan penyelenggaraan pendidikan guru untuk pengajaran agama di sekolah umum, dan guru pengetahuan umum di perguruan-perguruan agama.

Namun perhatian dari pemerintah yang ditandai dengan tugas Departemen Agama dan beberapa keputusan BPKNIP tersebut tampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika undang-undang pendidikan nasional pertama (UU No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954) disahkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah (umum). Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem, karena sistem pendidikan madrasah menurut pemerintah (Departemen P&K) lebih didominasi oleh “muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah”. Oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren.

Salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang “Peningkatan Mutu pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975.

Hingga saat ini persepsi dikotomi keilmuan dan pendidikan islam masih saja terjadi. Masing-masing kelompok memberikan arugumentasi pembenarannya, sehingga jika mengacu pada argumentasinya jelas sangat sulit untuk menyatukan antara keilmuan dengan pendidikan islam.

Pada 1977, Konferensi Muslim Dunia Pertama mengenai pendidikan muslim mengajukan salah satu usaha untuk menghilangkan dikotomi sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia muslim. Diputuskan bahwa jalan yang harus ditempuh adalah perlu segera dirumuskan sistem terpadu bidang keilmuan. Semua cabang ilmu harus diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam, karena pendidikan Barat dianggap hanya dapat mengembangkan peradaban materialistik belaka.

Berkaitan dengan hal di atas, jika kita perhatikan di Indonesia, dari jaman kolonial sampai sekarang ada tendensi yang mengarah pada pola akibat bentukan budaya yang mengakar kuat. Fenomena pembagian menjadi dua bagian antara negeri dan swasta, umum dan agama, sentralistik dan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis pusat, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis pengetahuan, kesemuanya itu lebih kita tempatkan sebagai fakta sejarah.

Fenomena dualisme lembaga pendidikan sekarang ini ada yang disebut sekolah umum dan ada diistilahkan sekolah agama, dimana terciptalah sarjana agama yang begitu pintar ilmu syariah, tapi tidak tahu menahu tentang ilmu umum. Begitu sebaliknya seorang profesor kimia, misalnya pintar sekali dibidangnya, tapi selalu mengatakan, saya ini orang awam untuk urusan agama.

Pendidikan agama di sekolah menurut Zakiah Darajat sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik karena mempunyai aspek jiwa atau pembentukan kepribadian dengan memberikan kesadaran dan pembiasaan melakukan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-laranganNya, melakukan praktek ibadah, sopan santun dalam pergaulan sesamanya sesuai dengan ajaran akhlak agamanya akan menjadi bagian integral dari kepribadiannya ketika dewasa nanti dan aspek-aspek pendidikan agama yang ditujukan kepada pikiran dan kepercayaan.

Adanya pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia sudah tidak bisa dinafikan lagi, akan tetapi kenapa pada faktanya pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan baik dari sisi *output* pendidikan yang masih rendah bila dibandingkan negara-negara yang baru merdeka seperti Vietnam. Walaupun demikian, pendidikan agama juga membawa dampak tersendiri dalam membendung hal-hal tersebut seperti pendidikan nilai dan akhlak, walaupun pada kenyataan di lapangan terjadi dualisme pendidikan yang memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum.

Hingga kini, masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa “agama” dan “ilmu”, “madrasah” dan “sekolah” adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek formal-material keilmuan, guru yang diangkat, metode pengajaran, laboratorium yang diperlukan, perpustakaan yang disediakan, keseriusan dan kesungguhan guru dalam mengajar, status sosial-ekonomi yang disandang, pengawas yang direkrut, akreditasi yang diberlakukan, bahkan sampai masuk ke institusi penyelenggara dan yayasan pendukungnya. Dengan lain ungkapan, ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu. Madrasah dengan seperangkat imej yang disandanginya tidak memerlukan sekolah, dan sekolah tidak memerlukan madrasah. Praktik kependidikan dan aktifitas keilmuan di tanah air sekarang ini seperti itulah gambarannya dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, persepsi masyarakat yang tidak tepat perlu dikoreksi dan diluruskan. Secara politis, undang-undang pendidikan nasional ingin menepis dan mengikis kesan seperti itu. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (SPN) No. 2 tahun 1989 dan lebih-lebih undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) membuktikan hal itu. Status madrasah yang berada dibawah naungan Kementerian

Agama sama dan sederajat dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan SKB 3 menteri tersebut yang dimaksud dengan madrasah ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Untuk merealisasikan SKB 3 menteri itu, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah yang dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut : Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, dan deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi.

Dengan diberlakukannya kurikulum standar yang menjadi acuan ini, maka berarti telah terjadi keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, kemudian adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang setaraf, serta madrasah akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SKB 3 menteri itu sendiri menetapkan hal-hal sebagai berikut : Ijasah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijasah sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, dan Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Adanya SKB 3 menteri tersebut bukan berarti beban yang dipikul madrasah akan bertambah ringan, akan tetapi justru sebaliknya menjadi semakin berat. Masalahnya disatu pihak dituntut harus mampu memperbaiki mutu pendidikan umum sehingga setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah umum, di lain pihak harus tetap menjaga agar mutu pendidikan agama tetap baik sebagai ciri khususnya.

Dengan adanya SKB 3 menteri tersebut, maka ada kesan bahwa identitas madrasah semakin berkurang atau bahkan hilang, karena madrasah sudah seperti sekolah umum. Disamping itu, dengan penyeragaman kurikulum di madrasah menjadikan kekhasan masing-masing madrasah, yang semula menjadi daya tarik tersendiri, menjadi kabur/hilang. Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, dan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 1976 sebagai realisasi SKB 3 Menteri tersebut, ternyata banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut (kurikulum 1975) dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok. Meskipun SKB 3 Menteri itu memberikan nilai positif dengan menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dengan kata lain, siswa keluaran dari madrasah memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan sekolah umum untuk mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat. Dengan berlakunya SKB 3 Menteri, maka kedudukan madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan SD, SMP dan SMA; dari segi muatan mata pelajaran, murid-murid madrasah pun memperoleh pengajaran ilmu sosial, sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, matematika dan lain-lain.

SKB 3 Menteri itu kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (Agama) tahun 1984 tentang "Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah". Yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah umum maupun di madrasah.

Masalah lain lagi, beban kurikulum madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan beban belajar anak sekolah. Hal itu dikarenakan pihak madrasah (Departemen Agama) menerjemahkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang "madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam" dan "kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah" diterjemahkan beban kurikulum madrasah adalah 100% pelajaran umum di sekolah ditambah dengan 100% pelajaran agama di madrasah. Padahal jam belajar tetap sama dan sikuensnya juga sama. Disisi lain kondisi, fasilitas dan latar belakang anak madrasah dengan anak sekolah cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah.

Dari persepsi sejarah, tidak ada yang menyangkal bahwa dualisme ataupun dikotomi dari sistem pendidikan kita – pendidikan "umum" di satu pihak dan pendidikan "agama" (baca: keagamaan) di pihak lain – adalah warisan dari zaman kolonial Belanda. Dari bukti sejarah, karena anak-anak yang bisa masuk sekolah Belanda sebelum kemerdekaan hanya terbatas pada anak-anak kaum bangsawan dan saudagar, maka anak-

anak orang Islam memilih madrasah atau pondok pesantren dan surau yang memang sudah ada sebelum muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, karena tekanan dari politik diskriminatif pemerintah kolonial, sekolah-sekolah agama Islam memisahkan diri dan terkotak dalam kubu tersendiri.

Dilain pihak, ditambah dengan adanya dua fenomena dalam dunia pendidikan Islam semakin membawa dampak yang rumit dalam pendidikan itu sendiri di Indonesia. Dalam dunia pendidikan Islam muncul dua fenomena, yakni; *Pertama*, yang umum terjadi adalah pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang normatif-tekstual baik di sekolah maupun madrasah terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum, humaniora dan ilmu-ilmu agama (*religious studies*) pada umumnya. *Kedua*, pendidikan ilmu-ilmu kealaman (Iptek) “dipaksa” kawin dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam yang normatif-tekstual dengan cara melekatkan dan menempelkan ayat-ayat pada temuan dan keberhasilan Iptek, namun terlepas begitu saja dari perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Perbedaan itu semakin hari semakin jauh, ibarat deret ukur terbalik, dan membawa akibat yang tidak nyaman bagi kehidupan intern dan lebih-lebih ekstern umat beragama. Pola pikir yang serba dikotomis ini menjadikan manusia terasing dari nilai-nilai spiritualitas-moralitas, rendah pemahaman etika sosialnya, terasing dari dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan masyarakat sekelilingnya, terasing dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosial-budaya sekitarnya. Singkatnya, terjadi proses dehumanisasi secara massif baik pada tataran kehidupan keilmuan, keagamaan, social-politik dan sosial-ekonomi.

Pendidikan dan pengajaran di sekolah dan madrasah yang dilakukan secara terpisah dalam dua atap maupun sistem satu atap antara madrasah dan sekolah tetapi dengan pola metode pengajaran dan dikotomistik terintegrasi mulai diratapi, disesali oleh banyak kalangan. Hati nurani terlepas dari akal sehat. Tindak kekerasan merebak dimana-mana. Empati dan simpati dan sosial skill (kecakapan dan kematangan sosial) menipis. Nafsu serakah dan ketidaksabaran menguasai perilaku manusia cerdas pandai. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Alam lingkungan rusak berat. Tindakan kekerasan dan *mutual distrust* mewabah dimana-mana. Jauh sebelumnya, dalam sejarah kependidikan Islam telah pula terpola pengembangan keilmuan yang bercorak *integralistik-ensiklopedik* di satu sisi, yang ditokohi para ilmuan seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, berhadapan dengan pola pengembangan keilmuan agama yang *spesifik-parsialistik* di sisi lain yang dikembangkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih pola keterpisahan model pendidikan ini rupanya diwariskan secara turun temurun antara generasi hingga saat ini.

Yang lebih sulit dimengerti, dalam praktik pendidikan dan pengajaran agama Islampun keterpisahan dan tidak terintegrasi pendidikan agama dengan isu-isu sosial ekonomi sangat mudah dijumpai. Keterpisahan secara diametrikal antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis-ekonomis, berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Dalam ketiga revolusi peradaban manusia, yaitu revolusi hijau, revolusi industri dan revolusi informasi, tak satupun ilmuan Muslim tercatat namanya dalam lembaran tinta emas pengembang ilmu pengetahuan. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler sebagai simbol keberhasilan sekolah dan perguruan tinggi umum dengan berbagai implikasinya pada tataran moral dan etik kehidupan manusia di seluruh dunia di satu pihak, dan perkembangan dan pertumbuhan madrasah dan perguruan tinggi agama (baca: Islam) yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keIslaman normatif-klasik dengan berbagai dampaknya pada penciptaan tenaga terampil dalam dunia ketenagakerjaan di lain pihak, menjadikan kedua-duanya mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-keagamaan di tanah air.

Dari sini tergambar bahwa ilmu-ilmu sekuler yang dikembangkan di sekolah dan di Perguruan Tinggi Umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Agama secara terpisah seperti yang sekarang ini berjalan sedang terjangkit *krisis relevansi* (tidak dapat memecahkan banyak soal), mengalami kemandegan dan kebuntuan (tertutup untuk pencarian alternatif-alternatif yang lebih mensejahterakan) dan penuh bias-bias kepentingan disana sini (filosofis, ortodoksi keagamaan, etnis, ekonomis, politik, gender, peradaban). Dari latar belakang seperti itu, gerakan *rapproachment* (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) antara dua kubu keilmuan adalah merupakan keniscayaan. Gerakan *rapproachment*, untuk dapat menyebutnya juga sebagai gerakan *integrasi epistemologi keilmuan* adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang serba kompleks dan tak terduga pada milenium ketiga serta tanggungjawab kemanusiaan bersama secara global dalam mengelola sumberdaya alam yang serba terbatas dan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai *khalifah fi al-ardli*.

Lebih luas lagi, Perguruan Tinggi Islam secara sadar harus berani mengkaji ulang visi, misi dan paradigma keilmuan yang dibangun dan dipeliharanya. Begitu juga Perguruan-Perguruan Tinggi Umum yang

sudah mapan dan berjalan selama ini. Ide dan usulan perlunya dikembangkan ilmu-ilmu sosial Profetik dan Kajian Agama secara kontekstual di Perguruan Tinggi Umum adalah merupakan tanda adanya keprihatinan yang serius tentang arah pengembangan dan tujuan pembelajaran ilmu-ilmu agama pada perguruan tinggi umum yang telah berjalan selama ini. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih integralistik atau paling tidak keduanya bersifat komplementer. Filsafat Pendidikan Islam yang baru, yang perlu dijadikan acuan dan sekaligus tujuan pendidikan UIN, IAIN dan STAIN sebagai produsen ilmu pengetahuan yang akan menjadi *feeder* bagi tenaga guru madrasah dan sekolah, pengelola dan pengurus yayasan yang dimiliki sekolah atau madrasah haruslah diorientasikan pada lahirnya sarjana yang memiliki lima kemampuan, yaitu kemampuan menganalisis persoalan social-keagamaan secara akademik dan komprehensif (*intellectual capital building*), kemampuan melakukan inovasi yang terencana dan berkesinambungan *entrepreneurial capital building*, kemampuan memimpin sesuai dengan tuntutan persoalan kemasyarakatan, keilmuan, maupun profesi yang kemampuan membangun jaringan dan hubungan sosial kemasyarakatan yang luas (*social capital building*) ditekuninya (*institutional capital building*), dalam satu tarikan nafas etos keilmuan dan keagamaan yang terpadu (*spiritual capital building*).

Berdasarkan dimensi epistemologis maka dapat dijelaskan bahwa Integrasi antara Ilmu dan Agama bukan sesuatu yang terpisah dan bukan sesuatu yang satu berada diatas yang lain. Pandangan bahwa agama lebih tinggi dari ilmu adalah pengaruh dari konsep tentang dikotomi ilmu dan agama. Ilmu dianggap sebagai ciptaan manusia yang memiliki kebenaran relatif yang oleh karenanya memiliki posisi lebih rendah dibandingkan agama sebagai ciptaan tuhan yang memiliki kebenaran absolut. Sehingga jika sampai saat ini adanya fenomena Apabila seseorang ditanya tentang sains, maka niscaya ia akan menyebut matematika, geografi, linguistik, biologi, antropologi, dll. Sebaliknya apabila ia ditanya tentang Ilmu Agama, maka ia akan menyebutkan Fiqh, Tasawuf, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist dsb. Fenomena ini umum terjadi dalam masyarakat, dimana pemisahan atau sering disebut dikotomi sudah mendarah daging pada diri mereka, sehingga kedua ilmu tersebut dianggap berbeda dan tidak mungkin disatukan. Demikian pula pada lembaga pendidikannya, selama ini yang kita ketahui ada lembaga pendidikan agama: seperti madrasah, pondok pesantren, STAIN, IAIN dan UIN dan PTAI lainnya Sedangkan lembaga pendidikan umum. SD, SMP, SMA dan universitas disebut sebagai lembaga pendidikan umum. Serta kementerian pembuat kebijakanpun juga berbeda Lembaga pendidikan umum: kemendikdasmen dan menristekdik dan Lembaga pendidikan islam: Kemenag.

Secara realita dalam alqur'an maupun al hadist ditegaskan bahwa Islam tidak mengenal dikotomi, membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Dalam Islam ilmu adalah terintegrasi dan terpadu secara nyata. Tuhan, manusia dan alam adalah rentetan yang terpadu. Karena itu dalam Islam mempelajari ilmu agama tidak harus meninggalkan ilmu umum, begitu juga sebaliknya, sehingga melahirkan generasi yang beragama sekaligus berilmu, demikian juga sebaliknya. Agama sebagai basis semua ilmu pengetahuan (sains). Disini semua ilmu pengetahuan tidak hanya melebur dalam agama, tetapi menempatkan agama sebagai pendukung seluruh kegiatan ilmiah. Integrasi ilmu dan agama tidak dapat dilakukan secara formalitas dengan cara memberikan justifikasi ayat al-Qur'an pada setiap penemuan dan keilmuan, memberikan label agama atau Islam pada istilah-istilah keilmuan dan sejenisnya, tetapi perlu ada perubahan paradigma pada basis keilmuan Barat, agar sesuai dengan basis dan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan realitas metafisik, religius dan teks suci Menurut Syed Naquib al-Attas, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus menerus berubah. Sehingga dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu sekular.

Dengan adanya kenyataan tersebut yang paling utama dan pertama dilakukan adalah bagaimana mewujudkan integrasi yang nyata keilmuawan dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi ke depan. Faisal Ismail mengemukakan bahwa, arus dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam dapat dibendung dengan beberapa hal, sebagai berikut. 1. Memperkuat dan memberdayakan pendidikan spiritual-keimanan pada setiap jenjang pendidikan untuk mencegah sekularisasi IPTEK dan pendidikan. 2. Menghindari pandangan pragmatis-hedonis-permisif yang berasumsi apa saja boleh dilakukan (permisif, *ibahah*). Pandangan ini dapat membuat seseorang longgar dalam beragama 3. Menggunakan metode dan pendekatan keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan. 4. Menghindari pendidikan berpaham antroposentris yang berdalil bahwa manusia adalah pusat segalanya 5. Menghindari paham *scientism* (saintisme) yang berdalil bahwa ilmu pengetahuan merupakan tolak ukur kebenaran. 6. Menolak paham agnotisme dalam pendidikan, "percaya kepada Tuhan tidak, tidak percaya juga tidak" sikap acuh tak acuh yang bersikap masa bodoh akan keberadaan Tuhan. 7. Menanamkan kesadaran untuk menjauhkan pandangan "*science for the sake of science*" (ilmu untuk

ilmu) karena tidak sejalan dengan Islam. 8. Melakukan penelitian murni (*pure-research*) yang menghantarkan seseorang kepada pengertian bahwa di balik setiap sesuatu yang diteliti dan diperoleh dari hasil penelitian tersebut ada Dzat Yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya yang mengatur dan mengendalikan alam ini.

Langkah konkrit yang harus dilakukan untuk mewujudkan integrasi keilmuwan dalam pendidikan islam adalah islamisasi pengetahuan, yang dilakukan melalui 3 model yaitu: model purifikasi, modernisasi Islam dan Neo-Modernisme. 1. Islamisasi Model Purifikasi bermakna pembersihan atau penyucian. Dengan kata lain, proses Islamisasi berusaha menyelenggarakan pengendusan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan nilai dan norma Islam secara *kaffah*, lawan dari berislam yang parsial. Ajaran ini bermakna bahwa setiap ilmuwan Muslim dituntut menjadi *actor* beragam yang loyal, *concern* dan *commitment* dalam menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam aspek kehidupannya, serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai minat, bakat, kemampuan, dan bidang keahliannya masing-masing dalam perspektif Islam untuk kepentingan kemanusiaan. Model Islamisasi ini sebagaimana dikembangkan oleh Al-Faruqi dan Al-Attas. Adapun empat rencana kerja Islamisasi Pengetahuan Al-Faruqi, meliputi: (a) penguasaan khazanah ilmu pengetahuan muslim, (b) penguasaan khazanah ilmu pengetahuan masa kini, (c) indentifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan itu dalam kaitannya dengan ideal Islam, dan (d) rekonstruksi ilmu-ilmu itu sehingga menjadi suatu paduan yang selaras dengan wawasan dan ideal Islam. 2. Islamisasi Model Modernisasi Islam Modernisasi berarti proses perubahan menurut fitrah atau sunnatullah. Model ini berangkat dari kepedulian terhadap keterbelakangan umat Islam yang disebabkan oleh sempitnya pola pikir dalam memahami agamanya, sehingga sistem pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan agama Islam tertinggal jauh dari bangsa non-muslim. Islamisasi disini cenderung mengembangkan pesan Islam dalam proses perubahan sosial, perkembangan IPTEK, adaktif terhadap perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan sikap kritis terhadap unsur negatif dan proses modernisasi. Modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Untuk melangkah modern, umat Islam dituntut memahami hukum alam (perintah Allah swt) sebelumnya yang pada giliran berikutnya akan melahirkan ilmu pengetahuan. Modern berarti bersikap ilmiah, rasional, menyadari keterbatasan yang dimiliki dan kebenaran yang didapat bersifat relatif, progresif-dinamis, dan senantiasa memiliki semangat untuk maju dan bangun dari keterpurukan dan ketertinggalan. 3. Islamisasi Model Neo-Modernisme Model ini berusaha memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits dengan mempertimbangkan khazanah intelektual Muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan IPTEK. Islamisasi model ini bertolak dari landasan metodologis; (a) persoalan-persoalan kontemporer umat harus dicari penjelasannya dari tradisi, dari hasil ijtihad para ulama terdahulu hingga sunnah yang merupakan hasil penafsiran terhadap al-Quran, (b) bila dalam tradisi tidak ditemukan jawaban yang sesuai dengan kehidupan kontemporer, maka selanjutnya menelaah konteks sosio-historis dari ayat-ayat al-Quran yang dijadikan sasaran ijtihad ulama tersebut, (c) melalui telaah historis akan terungkap pesan moral al-Quran sebenarnya yang merupakan etika sosial al-Quran, (d) dari etika sosial al-Quran itu selanjutnya diamati relevansi dengan umat sekarang berdasarkan bantuan hasil studi yang cermat dari ilmu pengetahuan atas persoalan yang dihadapi umat tersebut, (e) al-Quran berfungsi evaluatif, legitimatif hingga pada tahap pemberi landasan dan arahan moral terhadap persoalan yang ditanggulangi.

Namun yang terpenting sekarang ini sudah terakomodasinya integrasi keilmuwan pada jenjang perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi islam mulai membangun keintegrasian keilmuan islam dengan keilmuan umum, misalnya di IAIN, STAIN, atau perguruan tinggi berbasis islam telah membuka program studi psikologi islam, ekonomi syariah, hukum syariah yang telah dibuka di UMS, UNISULA, mapun di UII yogyakarta.

SIMPULAN

Dari uraian di atas hasil penelitian menyimpulkan bahwa,

1. Kebijakan pendidikan nasional Indonesia sekarang ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk, setidaknya untuk meminimalisir dampak dan implikasi pemikiran dualisme terhadap sistem pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya untuk melakukan integrasi institusi pendidikan umum dan agama. Segala konsekuensi yang dapat timbul dari hal tersebut, termasuk mengenai keberlanjutan eksistensi dualisme dalam pemikiran dan praktek pendidikan Indonesia di tengah-tengah upaya tersebut, masih menyediakan ruang terbuka bagi perdebatan-perdebatan selanjutnya.
2. Pelaksanaan implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi islam hingga saat ini belum terwujud secara maksimal, hal ini disebabkan masih adanya 2 kementerian yang mengurus pendidikan umum dan pendidikan islam

3. Ke depan agar implementasi integrasi keilmuan dalam pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi islam, harus diupayakan penanganannya pendidikan dalam satu kementerian
4. Integrasi keilmuan pada jenjang perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi islam mulai membangun keintegrasian keilmuan islam dengan keilmuan umum, misalnya di IAIN, STAIN, atau perguruan tinggi berbasis islam telah membuka program studi psikologi islam, ekonomi syariah, hukum syariah yang telah dibuka di UMS, UNISULA, maupun di UII yogyakarta.

SARAN

1. Sebaiknya para pembuat kebijakan harus menghilangkan dikotomi antara keilmuan dengan dunia pendidikan Islam untuk semua jenjang, untuk perlakuan terhadap sekolah-sekolah berbasis islam jangan dibedakan dengan sekolah-sekolah yang bersifat umum. Perlakuan dukungan guru, sarana dan prasarana serta kecanggihan untuk akses teknologi harus diupayakan sama sehingga akan terjadi persepsi yang sama dalam memahami keintegrasian keilmuan dengan semua lembaga pendidikan islam di indonesia
2. Kementerian yang ada sekarang ini yaitu kemenag yang mengurus pendidikan berbasis islam harus dirubah tugas pokok dan fungsinya, sehingga semua jenis dan bentuk pendidikan termasuk pendidikan islam tetap ditangani oleh mendikbud saja. Dengan satu pintu penanganan ini maka akan menghilangkan kesan terjadinya dikotomi pendidikan dan juga dikotomi keilmuan. dengan dua rekomendasi ini, maka dapat memperkuat posisi NKRI

REFERENSI

- Alim Ruswantoro, "Paradigma Keilmuan UIN Yogyakarta" dalam M. Yusuf dan Mustofa (ed.), *Mengukir Prestasi di Jalur Khusus*, (Yogyakarta: Penerbit Pendi Pontren Depag RI, 2007).
- Abdurrahman, Ahmad Taufiq. *Integrasi Pendidikan Umum dan Agama*. Diterbitkan di Majalah Qalam, edisi dummy, oktober 2008, rubrik Fokus.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Yayasan Insan Kamil dan Pustaka Pelajar. 1996.
- Darajat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Degeng, I Nyoman Sudjana. dkk., *Jurnal Teknologi Pembelajaran*. Malang: UM, 2000.
- Dhofir, Zamakhsari. *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*. Jakarta : Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs of The Republic Indonesia, 1995.
- Effendy, Bahtiar. *Repolitikasi Agama*. Bandung: Mizan, 2000.
- Hamid potilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta. 2005.
- Heriyanto, Tedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2002.
- I. Nyoman S. Degeng. *Paradigma Pendidikan Dari Behavioristik ke Konstruktivistik*. disampaikan pada seminar Nasional di SC UIIS Malang. 21 Oktober 2002.
- Kunandar. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mahmud Thoha APU. *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan social & Humaniora*. Jakarta: TERAJU, 2004.
- Muhamad, Mahatir. *Globalisation and the New Realities*. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 2002.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakter dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nawawi, Rif'at Syauqi et. al. *Metodologi Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Jogjakarta: UGM Press, 2005.
- O'neil, William F. *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2007.
- Sukardi. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Jogjakarta: Penerbit Usaha Keluarga, 2002.
- Suparno, Paul. *Filsafat Konstruktivistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Syukur, M. Amin Abdullah dan Masyharuddin. *Intelektualisme Tasawuf; Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Tholib, Muhammad. *Melacak Kekafiran Berfikir*. Yogyakarta: Uswah, 2007.
- Wen, Sayling. *Future Of Education (Masa Depan Pendidikan)*. Batam: Lucki Publisher, 2003.